



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN KARANTINA PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AMIR HASANUDDIN**
2. Jabatan : **KEPALA BALAI**
3. NHK : **404561**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.535.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 380 m2/200 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 385.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/104 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **284.000.000**

1. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 2SX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **---**

D. SURAT BERHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **188.377.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **---**

Sub Total Rp. **2.007.377.000**

III. HUTANG Rp. **736.127.301**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **1.271.249.699**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN KARANTINA PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUJIANTO
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 226514

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.335.000.000

1. Tanah Seluas 399 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
2. Tanah Seluas 544 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 457 m2/104 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 725.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 88.500.000

1. MOBIL, TOYOTA /KIJANG INOVA G MINIBUS PENUMPANG Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 2.PV/ SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 17.591.971

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.442.891.971

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.442.891.971

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : YUNITA WAHYUNINGSIH
NIK : 6171054106790010
Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Kerja : BADAN KARANTINA PERTANIAN
Sub Unit Kerja : BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PONTIANAK
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Jenis Laporan : Periodik - 2022
Tanggal Kirim : 12 Januari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : EMI PURWANI
NIK : 6171025405800002
Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Kerja : BADAN KARANTINA PERTANIAN
Sub Unit Kerja : BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PONTIANAK
Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
Jenis Laporan : Periodik - 2022
Tanggal Kirim : 4 Januari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : ELLY NURAINI
NIK : 6171035011680010
Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Kerja : BADAN KARANTINA PERTANIAN
Sub Unit Kerja : BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PONTIANAK
Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN
Jenis Laporan : Periodik - 2022
Tanggal Kirim : 3 Januari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : FIKA ANGRY SAMSAGA
NIK : 6171045202900001
Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Kerja : BADAN KARANTINA PERTANIAN
Sub Unit Kerja : BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PONTIANAK
Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
Jenis Laporan : Periodik - 2022
Tanggal Kirim : 13 Januari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.